**PEREKONOMIAN INDONESIA**

**Tema : Pembangunan dan Otonomi Daerah**

**MODUL PERKULIAHAN pertemuan ke-12,Online ke-10**



**Disusun Oleh :**

**TIM DOSEN PEREKONOMIAN INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**JAKARTA BARAT**

**2019**

**PEMBANGUNAN DAN OTONOMI DAERAH**

1. **Pengertian Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu Negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari otonomi daerah Karena pembangunan dapat dilakukan dengan maksimal jika otonomi daerah sudah diimplementasikan dengan baik.

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan
2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

 Tujuan pembangunan daerah adalah:

1. Meningkatkan keadaan ekonomi daerah sehingga mandiri di dalam bidang ekonomi untuk daerah sehingga mandiri di dalam bidang ekonomi untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan keadaan sosial daerah unutk mencapai kesejahteraan sosial secara adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat di daerah.
3. Mengembangkan setiap ragam budaya daerah sehingga menjamin kelestarian budaya  daerah di antara budaya-budaya nasional Indonesia lainnya.
4. Meningkatkan dan memelihara keamanan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarkat seutuhnya.
5. Membantu pemerintah  pusat dalam mempertahankan, memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara RI.

Prinsip Pembangunan Daerah

1. Tetap berada di dalam kerangka NKRI.
2. Tetap menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
3. Demokrasi dalam setiap bidang kehidupan bernegara.
4. Pemerataan dan keadilan dalam berperan serta pada pembangunan daerah.
5. Masyarakat, kelompok usaha kecil dan kelompok usaha kecil dan kelompok menengah lebih dipacu untnuk berperan aktif.
6. Memanfaatkan secara ijaksana semua potensi sumberdaya nasional yang berada di daerah sesuai dengan fungsi dan keadaan masing-masing sumberdaya.
7. Sesuai dengan keragaman keadaan daerah.
8. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, baik secara desentralisasi, dekonsentrasi maupun dalam rangka pembantuan.
9. Bekerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang kegiatan yang lain dengan semua daerah lainnya.
10. Pemerintah yang baik, berarti pemerintah daerah otonom harus dilaksanakan secara tepat guna, efisien dan mmemiliki produktifitas yang tinggi serta lepas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
11. Investasi disertai ketentuan unutk meningkatkan penggunaan sumber daya yang dihasilkan.
12. Pelaku pembangunan daerah.

Otonomi sesungguhnya diambil dari bahasa Yunani, dari kata “autos” yang bisa diterjemahkan sebagai sendiri, dan “namos” yang berarti undang – undang atau peraturan. Jika disambung dan diartikan berarti maknanya adalah aturan sendiri. Sehingga maksud dari Otonomi Daerah adalah wilayah dengan batas – batas tertentu yang mempunyai aturannya sendiri. Menurut UU No.32 tahun 2004, arti dari Otonomi Daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat seseuai dengan undang – undang yang berlaku”. Tidak jauh dari arti yang sudah disebutkan dalam Undang – Undang, di dalam Kamus Hukum dan Glosarium, Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang bertujuan untuk melakukan pengaturan serta pengurusan kepentingan masyarakat sesuai dengan karsa sendiri, yang didasari oleh aspirasi dari masyarakat sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

Menurut para ahli, definisi Otonomi Daerah adalah sebagai berikut ini:

1. Menurut Widjaja

Merupakan sebuah bentuk dari desentralisasi pemerintah yang tujuannya untuk pemenuhan kepentingan negara dengan menggunakan upaya yang dibuat lebih baik untuk mendekatkan tujuan dari pemerintah supaya cita – cita masyarakat yang adil dan makmur bisa terwujud. Desentralisasi sendiri bisa diartikan sebagai wewenang oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah agar mengurus wilayahnya sendiri.

1. Menurut Syarif Saleh

Beliau mengartikan Otonomi Daerah sebagai hak yang mengatur dan memerintah wilayahnya sendiri, dimana hal itu merupakan pemberian hak dari pemerintah pusat.

1. Menurut Benyamin Hoesein

Menurutnya, Otonomi Daerah itu adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat, yang termasuk ke dalam wilayah nasional suatu negara namun secara informal pemerintahannya berada di luar dari pemerintah pusat.

1. Menurut Vincent Lemius

Dalam pengartiannya, Otonomi Daerah merupakan sebuah kebebasan atau kewenangan untuk pembuatan keputusan politik dan administrasi yang semuanya berlandaskan pada peraturan yang ada pada Undang – Undang. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II) dengan beberapa dasar pertimbangan:

1. Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;
2. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif;
3. Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:

1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah;
2. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju

Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan otonomi daerah menganut beberapa prinsip, meliputi :

1. Nyata, otonomi dilakukan secara nyata dengan disesuaikan terhadap situasi dan kondisi obyektif di daerah;
2. Bertanggung jawab, otonomi diselaraskan atau diupayakan agar dapat mendorong kelancaran pembangunan di seluruh pelosok tanah air;
3. Dinamis, pelaksanaan otonomi perlu dinamis agar dapat menjadi sarana dan dorongan lebih baik dan maju.

Agar Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku, perlu adanya asas yang diterapkan, diantaranya adalah sebagai berikut ini:

1. Tugas Pembantuan (Medebewind)

Asas ini berdasarkan pada penugasan suatu urusan dari pusat ke daerah yang lebih rendah tingkatannya. Misalnya dari pemerintah pusat ke kabupaten atau kota untuk melakukan kewenangan pusat yang juga sudah menjadi kewenangan daerah. Tentang Tugas Pembantuan ini semua sudah diatur dalam undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974, (desa membantu dalam urusan pemerintahan yang ditugaskan daerah).

Ada dua hal yang terkandung dalam tugas pembantuan ini, yaitu adanya penyiratan antara hubungan atasan dan bawahan. Dimana atasan adalah pemerintaha pusat, dan pemerintahan daerah berlaku sebagai bawahan yang membantu pusat untuk melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan negara.

1. Dekonsentrasi

Maksud dari asas ini ialah pemberian wewenang dari pemerintahan pusat kepada alat – alat mereka yang berada di daerah untuk melakukan penyelenggaraan urusan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, wewenang didelegasikan.

Tanpa kehilangan wewenangnya, pemerintah daerah akan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Penyebaran wewenang diberikan pada petugas – petugas yang telah ditunjuk di setiap wilayah untuk selanjutnya diberikan tugas administratif atau tata usaha untuk keberlangsungan penyelenggaraan negara.

1. Desentralilsasi

Merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintahan pusat untuk pemerintahan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. desentralisasi ini telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan adanya asas ini maka:

* Hubungan antara daerah dan pusat bisa mewujudkan kesejahteraan sosial di daerah yang bersangkutan
* Hubungan antara daerah dan pusat antar satu dengan yang lainnya bisa berbeda – beda
* Hubungan antara daerah dan pusat yang terjalin tidak boleh membuat hak – hak rakyat menjadi berkurang, malahan rakyat turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
* Hak – hal daerah tidak boleh untuk berprakarsa dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah

Tujuan dari adanya otonomi daerah adalah :

1. Pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik
2. Kehidupan demokrasi berkembang
3. Mewujudkan keadilan nasional
4. Pemerataan wilayah daerah
5. Memelihara hubungan pusat dan daerah dalam NKRI
6. Meningkatkan peran serta masyarakat

**Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Kewenangan akan suatu permasalahan tertentu bisa diberikan kepada pusat maupun daerah dengan memenuhi kriteria kewenangan yang telah diatur dalam Undang-undang. Adapun kriteria kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat, meliputi :

* lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
* penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
* manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
* penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
* peranannya Strategis bagi kepentingan nasional.

Sedangkan kriteria kewenangan dari daerah provinsi, yakni :

* lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
* penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
* manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
* penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Sedangkan kriteria kewenangan dari Daerah kabupaten / kota, meliputi:

* lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
* penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
* manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
* penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Adanya UU no 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan, bahwa sesuai pasal 18, maka penyelenggara pemerintah Daerah diharuskan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar.

Adapun pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan juga wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standard Pelayanan Minimal (SPM) sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan mengenai SPM ini kemudian akan diatur melalui peraturan pemerintah yang diterbitkan kemudian.

**Berikut ini terdapat beberapa dampak positif dari otonomi daerah:**

1. Sosial Budaya Lebih Berkembang

Dengan adanya otonomi daerah setiap aspek daerah dapat dikembangkan. Sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang mengijinkan pengembangan daerah selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak melangkahi tugas dan wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah dapat mengembangkan semua aspek kehidupan sosial budayanya untuk kesejahteraan. Misalnya pengembangan kesenian daerah menjadi lebih maju dan dikenal di manca negara. Atau pengembangan produk makanan khas daerah. Sampai pengenalan suatu wilayahnya menjadi daerah wisata unggulan.

1. Pertahanan dan Keamanan

Daerah, khususnya yang berbatasan dengan wilayah negara lain merupakan ujung tombak Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah melalui pemerintah daerah akan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada. Dengan demikian, keinginan untuk memisahkan diri atau menjadi bagian dari wilayah negara lain yang terlihat lebih maju dapat diredam. Pimpinan daerah dapat dengan mudah mengatur pertahanan dan keamanan wilayahnya karena cakupan yang lebih kecil.

1. Potensi Daerah Berkembang

Dengan otonomi daerah, semua potensi daerah juga dapat berkembang. Selain sosial budaya yang sudah disebutkan di atas, juga potensi lain. Misalnya pendidikan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduknya, sumber daya alam yang berkaitan dengan ekspor dan impor, dan sebagainya. Potensi daerah diharapkan dapat meningkatkan anggaran pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

1. Kewenangan Daerah Atas Kebijakan Tertentu

Setiap wilayah Indonesia mempunyai ciri khas. Apalagi jika suatu daerah mempunyai sejarah dan latar belakang yang tidak sama. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai kebijakan atas kebijakan tertentu yang sesuai degan kondisi wilayahnya. Sebut saja,daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai sistem pemerintah daerah khas keraton dan berbeda dengan semua wilayah di Indonesia. Nangroe Aceh Darusalam adalah contoh lain daerah yang menerapkan kebijakan atau hukum Islam di wilayahnya. Kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah dan masyarakatnya lebih berkembang sesuai ciri dan potensi yang dimiliki.

1. Daerah Dapat Lebih Maju

Setelah suatu daerah mempunyai kewenangan sendiri, dapat megembangkan potensi daerah masing-masing, dan sosial budayanya lebih maju maka diharapkan daerah menjadi lebih maju.Daerah yang lebih maju tentunya akan mendukung negara menjadi lebih maju pula. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, sumbangannya terhadap pendapatan nasional juga meningkat. Bayangkan jika semua daerah di Indonesia dapat mengembangkan diri. Indonesia akan menjadi lebih baik.

1. Mudah Mengelola Sumber Daya

Sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di daerah lebih mudah dikelola. Pemerintah daerah sebagai lembaga terdekat akan lebih mudah mendeteksi. Setelah dideteksi, pengembangannya akan lebih mudah. Misalnya, jika suatu daerah mempunyai sumber daya laut yang beragam. maka pemerintah daerah akan mengelola wisatanya, mengelola perikanan, mengelola perbatasan wilayah lautnya, dan sebagainya. Jika semua diatur oleh pemerintah pusat belum tentu semua akan tertangani dengan baik. Karena tugas pemerintah pusat menjadi lebih banyak.

1. Efisisiensi Waktu

Otonomi daerah membuat waktu pembangunan negara menjadi lebih efisien. Segala sesuatu yang bisa dilakukan sendiri oleh daerah langsung diputuskan dan dijalankan. Jika semua harus ke pemerintah pusat, maka akan ada perjalanan untuk birokrasi mulai dari bawah sampai instansi terkait. Waktu yang dibutuhkan lebih lama. Padahal mungkin saja suatu kejadian butuh pemecahan masalah segera. Oleh karena itu, di setiap wilayah propinsi sampai kecamatan ada dinas-dinas yang mengenai bidang tertentu, ada pengadilan tingkat kecamatan, dan ada kepolisian tingkat kecamatan.

1. Efisiensi Biaya

Selain efisiensi waktu, dampak positif dari otonomi daerah adalah efisiensi atau mempersingkat waktu. Misalnya, jika seseorang ingin membuat akta kelahiran harus langsung sampai ke pemerintah daerah. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk hal tersebut. Apalagi jika orang tersebut tinggal jauh dari pemerintah pusat negara. Dia membutuhkan biaya mulai dari mengurus di tingkat paling rendah hingga perjalanan ke pusat.

1. Desentralisasi Kekuasaan

Otonomi daerah memberi kesempatan pada contoh penerapan asas desentralisasi kekuasaan. Di mana kekuasan tidak hanya ada pada pemerintah pusat. Ada pembagian wewenang dan fungsi. Dengan demikian, pemerintah dapat menyerap semua aspirasi masyarakat dari bawah. Pemerintah pusat juga tidak menjadi pemerintah otoriter dengan kekuasaan tidak terbatas.

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Otonomi daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Seperti contoh yang telah disebutkan, semua kebutuhan masyarakat secara administratif dapat dipersingkat waktu dan biayanya. Kualitas layanan publik dapat meningkat karena berhadapan langsung dengan masyarakat tanpa perwakilan.

1. Meningkatkan Kesejahteraan

Sesuai tujuan adanya otonomi daerah, diharapkan dengan otonomi tercapainya peningkatan kesejahteraan. Setiap daerah akan berlomba-lomba secara kreatif menggali semua potensi yang dimilikinya untuk menjadi lebih baik. Semua potensi di segala bidang akan digali untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini dilihat dari berbagai aspek, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah akan dapat lebih mudah mengatur hal tersebut.

1. Pemerataan Pembangunan

Jika semua diatur oleh pusat, ada kemungkinan beberapa daerah yang jauh dari jangkauan akan tertinggal. Ada kemungkinan daerah yang mempunyai sumber daya baik tertinggal karena semua yang daerah hasilkan dibagi rata dengan tidak adil. Atau yang paling buruk adalah perlakuan tidak adil terhadap pembangunan suatu daerah karena sebab kelompok atau golongan yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah kemungkinan-kemungkinan yang telah disebutkan diminimalisir. Pemerataan pembangunan dapat lebih diwujudkan melalui peran serta pemerintah daerah dan masyarakatnya masing-masing.

Setiap sistem mempunyai kekerangan. Setiap kebijakan mempunyai dampak negatif. Meskipun dampak negatif ini dapat diminimalisir oleh sumber daya manusia yang ada. Namun, ada tetap ada beberapa hal yang nampak jelas. Beberapa dampak negatif otonomi daerah, adalah ;

1. Daerah Miskin Lambat Berkembang

Daerah miskin atau yang mempunyai potensi dan sumber daya kurang menjadi lambat berkembang. Ini dikarenakan, setiap daerah berlomba mengembangkan wilayahnya masing-masing tanpa memepdulikan wilayah lain. Untuk hal seperti ini, sebaiknya pengaturan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya berusaha menggali kreativitas dari sumber daya manusianya.

1. Menyulut Konflik Antar Daerah

Pengembangan wilayah masing-masing dapat menyebabkan konflik antar daerah. Apalagi jika daerah berbatasan wilayah dan sumber daya alam adalah di perbatasan. Upaya menjaga keutuhanNKRI harus sering ditanamkan. Kearifan kepala daerah untuk membuat kebijakan dan kesepakatan bersama sangat dibutuhkan dalam hal ini.

1. Tidak Ada Koordinasi Antar Daerah

Sama dengan dampak negatif yang pertama, bahwa karena masing-masing daerah punya wewenang maka tidak ada koordinasi antar daerah. Kerjasama atau koordinasi hanya dilakukan sesuai kebijakan dan kesepakatan kepala daerah atau pemerintahan daerahnya

1. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial dapat terjadi khususnya pada wilayah yang berdekatan, tapi berbeda pemerintahan. Misalnya antara wilayah Jakarta dengan daerah penyangganya. Kesenjangan sosial ini dapat mengakibatkan konflik sosial jika dibiarkan.

1. Pengawasan Berkurang

Pemerintah pusat yang menyerahkan semua kebijakan kepada daerah membuat pengawasan berkurang. Dampak positif bagi pemerintah daerah yang baik maka mereka akan berkembang dengan positif karena meningkatkan kreativitas. Bagi pemerintahan daerah yang buruk, pengawasan yang sedikit menyebabkan banyak praktek yang dapat menyimpang

1. Pejabat Daerah cenderung menyalahgunakan wewenang

Pejabat daerah yang sewenang-wenang dan melupakan aspirasi rakyatnya dapat terjadi jika pengawasan terhadap daerah kurang. Meskipun hal ini sekarang bisa lebih diminimalisir karena masyarakat sudah cukup cerdas dan melek teknologi. Segala sesuatu yang salah dapat dishare dan dengan cepat diketahui pemerntah pusat.

1. Kecendrungan untuk mengurus wilayah sendiri

Setiap pemerintah daerah akan cenderung degan wilayahnya sendiri dan memungkinkan sikap kurang empati terhadap wilayah lain. padahal seharusnya sebagai negara kesatuan, semua kejadian di wilayah mana saja menjadi tanggung jawab bersama untuk diatasi.

Untuk melihat perkembangan otonomi dan pembangunan daerah, maka pemerintah harus melihat Indeks pembangunan manusia di daerarah/negara tersebut. **Indeks Pembangunan Manusia** (IPM) / **Human Development Index** (**HDI**) adalah pengukuran perbandingan dari [harapan hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Harapan_hidup), [melek huruf](https://id.wikipedia.org/wiki/Melek_huruf), [pendidikan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan) dan [standar hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_hidup) untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah [negara maju](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_maju), [negara berkembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang) atau [negara terbelakang](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_terbelakang) dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

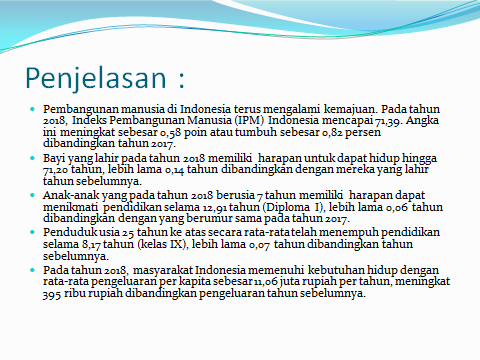
Menurut [Badan Pusat Statisitik](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pusat_Statistik) (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

* IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia ([masyarakat/penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat))
* IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
* Bagi [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia), IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja [Pemerintah](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia), IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan [Dana Alokasi Umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum) (DAU)

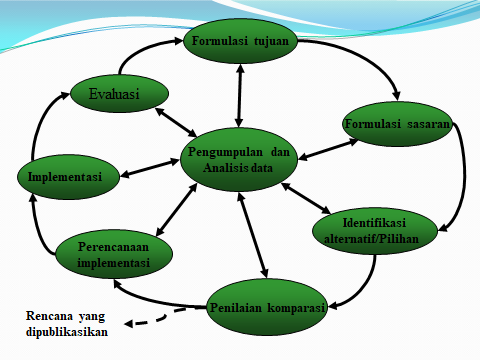
**Berikut tertera contoh Indeks Pembangunan Manusia (tahun 2018)**



(Sumber : BPS)



Dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka harus dilaksanakan evaluasi-evaluasi dan perencanaan yang baik, berikut konsep untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.



**PERMASALAHAN KEMISKINAN DAN KETIDAKBERDAYAAN MASYARAKAT**

Tantangan bangsa Indonesia di era otonomi daerah ini tidaklah ringan mengingat ada semacam fenomena dimana sementara bangsa-bangsa lain sudah saling berkompetisi untuk terus maju dalam rangka meningkatkan daya saingnya, bangsa kita justru terpuruk dalam pembenahan masalah-masalah ekonomi, sosial maupun politik di dalam negeri. Dibalik itu semua ada permasalahan yang paling mendesak untuk dicari pemecahannya saat ini adalah masalah kemiskinan. Mengingat permasalahan kemiskinan ini seakan beranjak di tempat terlebih bila kita melihat kondisi kemiskinan bangsa Indonesia terkini. Terungkap dari kajian terbaru dari Bank Dunia yang menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekadar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut (extreme poverty). Tapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60%3 penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi di atas jelas memprihatinkan mengingat realita kemiskinan di atas jelas bukanlah permasalahan yang mudah diatasi mengingat kondisi kemiskinan yang harus ditanggulangi mencakup banyak segi. Pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang terbatas dan ketidaksamaan kesempatan dalam menghasilkan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan tidak merata. Ini semua pada gilirannya menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan selanjutnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Secara umum permasalahan kemiskinan dan ketidakberdayaan disebabkan oleh dua faktor utama yang saling mengkait satu sama lain, yaitu : Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut permasalahan dan kendala yang berasal dari dalam individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, seperti : rendahnya motivasi, minimnya modal, lemahnya penguasaan aspek manajemen dan teknologi. Sementara faktor eksternal penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan adalah belum kondusifnya aspek kelembagaan yang ada. Disamping masih minimnya infrastruktur dan daya dukung lainnya sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat ditumbuhkembangkan.

**PENGENDALIAN PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) ATAS TERLAKSANANYA STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN**

Relevansi Propenas dengan penajaman strategi pemberdayaan masyarakat amatlah menarik untuk disimak karena bagaimanapun Propenas 1999-2004 dibuat dengan mengacu pada aspek pemberdayaan, desentralisasi, dan perubahan struktur sosial ekonomi secara terus menerus. Pengendalian tersebut ditujukan pada pembangunan ekonomi kerakyatan yang berprinsip partisipatif yaitu kegiatan ekonomi dilaksanakan untuk, dari, dan oleh rakyat. Konteks pengendalian ini mencerminkan adanya tuntutan konsistensi cara pandang dari masing-masing pedoman pelaksanaan pembangunan tersebut. Pengalaman telah memberi pelajaran yang sangat berharga bahwa masih ada celah dalam sistem pengendalian pembangunan nasional kita. Salah satunya dalam konteks perencanaan dimana pendekatan perencanaan nasional selama ini lebih berorientasi pada permasalahan makro ekonomi tanpa diikuti dengan perencanaan mikrosektoral yang matang dan baik. Kesenjangan persepsi antara konteks makro dan mikro seperti di atas ternyata memang terjadi, terbukti bahwa ternyata pengalaman pembangunan yang telah kita laksanakan selama ini tidak mampu mewujudkan fundamental ekonomi yang kuat seperti yang kita harapkan. Realita permasalahan di atas bagaimanapun perlu mendapat perhatian serius karena ekses dari kesenjangan persepsi itu akan menyebabkan terjadinya bias antara konsepsi program dengan pelaksanaan program di lapangan. Dan ini bila dikaji lebih jauh akan semakin menjauhkan esensi program pembangunan terhadap upaya menuju ke arah proses pemulihan ekonomi. Dari gambaran realita itulah maka keberadaan Propenas dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan persepsi antara visi makro dan visi mikro yang ada.

Propenas dapat lebih dioptimalkan sebagai bagian dari sistem pengendalian pembangunan nasional dengan memanfaatkan teknologi yang dapat memantau tentang data, proses maupun hasil dari pembangunan nasional yang telah maupun yang sudah dijalankan. Teknologi yang dimaksud adalah dengan cara mengembangkan sistem informasi geografis (SIG). SIG ini diharapkan dapat berperan dalam pemantauan, pengendalian, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan pemerintah. Disamping itu dapat difungsikan untuk melakukan pemetaan (mapping) atas potensi, permasalahan dan sekaligus pemberian alternatif solusi atas permasalahan yang ada. Dari kesemuanya itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan program sekaligus fasilitator pembangunan akan lebih mudah untuk membuat evaluasi sekaligus penajaman sasaran program, dalam bentuk : a. siapa saja yang menjadi sasaran program b. lokasi dimana program itu akan dilaksanakan c. penentuan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dijalankan untuk mewujudkan tujuan program d. penentuan kebutuhan dana minimal agar program dapat dijalankan, dan e. bagaimana sebaiknya program itu diimplementasikan.

**KONSEPSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Konsepsi pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Hakikat dari konseptualisasi pemberdayaan berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Secara tersirat pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui issue-issue lokal, seperti yang dinyatakan oleh Anthony Bebbington, yaitu: Empowerment is a process through which those excluded are able to participate more fully in decisions about forms of growth, strategies of development, and distribution of their product. 6 Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakanan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

**IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konsekuensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah kepada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development). Perubahan paradigma pembangunan tersebut mau tak mau menuntut adanya perubahan strategi pembangunan yang top-down ke pembangunan yang bottom-up yaitu dengan memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada masyarakat melalui kebijakan pemihakan dan pemberdayaan (demokratisasi pembangunan). Bertitik tolak dari itu maka sebenarnya tak salah bila kita me-review salah satu program pembangunan yang bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam bantuan PPK ini diwujudkan dalam bentuk : 1) partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan pembangu-nan ; 2) pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih kegiatan yang dibutuhkan ; 3) pemihakan pada penduduk miskin ; 4) pemberian akses informasi kepada setiap penduduk desa mengenai peluang, kebebasan memilih, dan memutuskan ; 5) penciptaan suasana kompetisi yang sehat dalam pengajuan usulan kegiatan ; 6) penerapan teknologi tepat guna dan padat karya ; dan 7) penggalakkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.

Ketika ada pemberian bantuan langsung dana bergulir (revolving block grant) maka dalam PPK telah diciptakan mekanisme perguliran dana itu melalui wadah/lembaga keuangan milik masyarakat yang disebut unit pengelola keuangan (UPK). UPK merupakan institusi pengelola dana yang dibentuk di kecamatan yang mempunyai peranan untuk memfasilitasi program dana bergulir yang berputar di masyarakat. UPK pada nantinya diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga keuangan alternatif milik masyarakat (LKM) yang tumbuh dari masyarakat sendiri. LKM ini merupakan embrio lahirnya lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip perbankan dan di dalam penyelenggarannya menerapkan prinsip kebersamaan (kooperatif).

lembaga UPK ini dapat diarahkan dalam berbagai model pengembangan kooperatif, yaitu : a) pengembangan lembaga kredit mikro, b) pengembangan UKM dan industri kecil yang berjiwa koperasi, c) pengembangan sistem ketahanan pangan nasional, dan d) usaha ekonomi produktif lainnya sesuai potensi dan kemampuan masyarakat lokal.

**Kesimpulan**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk  mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                        Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

                        Terdapat beberapa faktor prakondisi pelaksanaan otonomi daerah dalam pembangunan daerah, yaitu:

1.      Fasilitas.

2.      Pemerintah daerah harus kreatif.

3.      Politik lokal yang stabil.

4.      Pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha.

Dengan memahami pembangunan sebagai perubahan struktur, maka pemilihan strategi pembangunan yang tepat merupakan langkah awal yang baik untuk mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum atau masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, pembangunan harus diarahkan pada upaya untuk memajukan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam konteks itu berarti pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan manusia dalam melestarikan pembangunan secara mandiri.

Program pembangunan akan berhasil bila ada keikutsertaan secara aktif dari masyarakatnya. Dan ini relatif tidak terlalu sulit untuk dijalankan bila kita secara konsisten percaya pada pandangan yang menyatakan bahwa masyarakat akan bersedia berbuat apapun selama tujuannya transparan dan bermanfaat bagi mereka.

**Daftar Pustaka**

Arsyad,Lincoln.2004.*Ekonomi Pembangunan*.Yogyakarta:STIE YKPN

Alkadri dkk. (Peny),2001, *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah: Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia dan Teknologi. Jakarta* : Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.

Boediono. 2009. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE UGM.

Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta : Erlangga.

Hady H. 2004. Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia

<https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia>

<https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>

Kuncoro Mudrajad, Otonomi dan Pembangunan Daerah. (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 28

Mankiw, N. Gregory. 2003. Teori Makro Ekonomi, Jakarta : Erlangga.

Salvatore D. 1997. Ekonomi Internasional. Edisi ke-5. Jakarta: Erlangga.

Soetrisno, P.H. 1992. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia (Suatu Studi), Edisi Kedua*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Suroso, P.C. 1994. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi: Teori Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Pustaka.

Sumodiningrat, Gunawan.1994. Ekonomi Produksi. Yogyakarta : Gajahmada University Press.

Syaukani, dkk. 2005. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Todaro P, Stephen CS. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi ke-8. Jakarta: Erlangga.

Tuluh T.H. Tambunan. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Ghalia.